**PEMBERITAAN MEDIA CETAK NASIONAL TENTANG KEBIJAKAN GANYANG MALAYSIA
TAHUN 1963-1966**

DIYAH AYU HABIASTUTI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : diastutz@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pembentukan Federasi Malaysia merupakan penggabungan antara negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Gagasan pembentukan federasi menuai penentangan dari Indonesia, karena pembentukannya dianggap telah menghalangi revolusi Indonesia. Pasca diresmikannya Federasi Malaysia, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan politik konfrontasi yang ditandai dengan membentuk kebijakan mengganyang Malaysia. Kebijakan ganyang Malaysia tersebut, disampaikan oleh pemerintah melalui media massa atau pers kepada masyarakat. Pemberitaan mengenai kebijakan ganyang Malaysia diinformasikan secara beragam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan Ganyang Malaysia, 2) Bagaimana pemberitaan media massa tentang kebijakan Ganyang Malaysia dan 3) Bagaimana dampak pemberitaan Ganyang Malaysia terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi politik yang melatar-belakangi Kebijakan Ganyang Malaysia, untuk menganalisis pemberitaan media massa mengenai kebijakan Ganyang Malaysia dan untuk menganalisis dampak pemberitaan media massa mengenai kebijakan Ganyang Malaysia.

Penelitian sejarah ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi hingga historiografi. Penelitian sejarah yang benar tidak terlepas dari proses heuristik yakni penelusuran sumber. Penelusuran sumber berupa sumber primer seperti sumber-sumber berupa pemberitaan-pemberitaan media cetak dari surat-surat kabar *Suluh Indonesia*, *Merdeka*, *Warta Bhakti*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, dan majalah *Sket masa* pada tahun 1963-1966. Penelusuran sumber sekunder berupa buku-buku referensi yang terkait dengan politik konfrontasi Indonesia-Malaysia, skripsi, thesis, dan jurnal-jurnal ilmiah penelitian sejarah yang berkaitan dengan politik konfrontasi dan kebijakan ganyang Malaysia.

Penelitian sejarah ini berdasarkan sumber media cetak sebagai berikut. 1) Kebijakan ganyang Malaysia dilatarbelakangi oleh penentangan RI terhadap pembentukan federasi Malaysia. 2) Pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia oleh media cetak nasional sangat beragam dan berbeda. Pemberitaan kebijakan yang sangat mencolok yakni pemberitaan yang diinformasikan oleh surat kabar *Suluh Indonesia* sebagai surat kabar yang pro pemerintah dan condong pada idealisme presiden Sukarno, harian *Merdeka* yang pro pemerintah namun masih objektif, harian *Warta Bhakti* yang pro pemerintah, provokatif dan penuh pesan propaganda, serta majalah *Sketmasa* yang bukan hanya pro pemerintah namun terkesan sangat persuasif, provokatif dan bombastis. 3) Pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia berdampak pada respon masyarakat dalam mendukung kebijakan. Bentuk respon diantaranya berupa aksi corat-coret massa, demonstrasi, rapat-rapat raksasa, dukungan organisasi massa dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Kata Kunci: Pemberitaan, Media cetak, Kebijakan Ganyang Malaysia

Universitas Negeri Surabaya
Abstract

The formation of Malaysia's federation it's a combination between shadow land of British in Southeast Asia that include Malaysia, Singapore, Sabah, Serawak, and Brunei. The idea of forming the federation raises opposition from Indonesia, because its formation is considered to have prevent the revolution of Indonesia. Pasca legitimated of the Malaysia Federation, Indonesia decided to carry out political confrontation marked by establishing a policy against Malaysia. The Policy crush of Malaysia, submitted by the government through the media or the press to the public. News about the crush Malaysia informed policies variously.

Based on background of the study, it can conclude the formulation of research problem as follows, 1). How does the background of policies to against Malaysia, 2). How does the news of mass-media about the policy to against Malaysia, and 3). How does the impact of news about against Malaysia toward economic stability, social and politic at that period. The purpose of this study was to describe the political condition as the background of the policy to against Malaysia, to analyzing the news of mass-media about policy to against Malaysia and also to analyze the impact of the mass-media about policy to against Malaysia.

The historical research using historical research methods include heuristics, criticism, interpretation until historiography. The true historical research can't be separated from the heuristic process that is the source of investigation. The source of investigation such a primary source as the sources in the form of news-print media reporting from newspapers Suluh Indonesia, Merdeka, Warta Bhakti, Kompas, Sinar Harapan, and Sket Masa magazines in 1963-1966. Secondary sources such as reference books that related with political confrontation between Indonesia-Malaysia, essay, thesis, and scientific journals of the historical research that relating with political confrontation and policy to against Malaysia.

This historical research based on the mass-media sources as follows. 1) Policy crush of Malaysia caused by Indonesia opposition to the formation of the Malaysian federation. 2) News policy crush of Malaysia by the national print media is very diverse and different. News policy was very flashy is news who informed by the newspapers Suluh Indonesia as pro-government newspaper and skewed to idealism president Sukarno, Merdeka daily pro-government but still objective, Warta Bhakti daily pro-government, provocative and full of propaganda messages and Sketmasa magazine who not only pro-government but seemed very persuasive, provocative and bombastic. 3) News policy crush of Malaysia have impacted to public response in support policy. Forming of response among others is vandalism, demonstration, giant meetings, support of mass organizations, and nationalization of foreign companies.

Keywords : News, Print media, Policy crush of Malaysia

PENDAHULUAN

Perjalanan politik pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan telah mengalami pasang surut, tidak terkecuali juga dengan kondisi politik masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan alat untuk mencapai cita-cita revolusi. Revolusi yang anti neokolonialisme, kolonialisme, dan liberalisme (nekolim).¹ Kekuatan-kekuatan neo-kolonialisme, dan imperialisme yang dianggap menghalangi cita-cita revolusi, ditandai dengan pembentukan Federasi Malaysia.

Federasi Malaysia merupakan penggabungan antara negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara yang meliputi Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Gagasan untuk membentuk federasi tersebut pertama kali dikemukakan oleh Tengku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri Malaysia.² Gagasan ini dikemukakan pada tanggal 27 Mei 1961. Federasi Malaysia mendapat dukungan penuh dari pihak Inggris berdasarkan pada kepentingan ekonomi dan strategi. Gagasan pembentukan Federasi Malaysia dianggap Indonesia sebagai pembentukan suatu negara yang menghalangi revolusi karena bertentangan prinsip dan manifestasinya.

Ketegangan antar kedua negara ini makin memanas ketika Tengku Abdul Rahman menyatakan tuduhan bahwa angkatan perang revolusioner pemberontakan Brunei telah dilatih dan dibentuk di Kalimantan utara tapal batas Indonesia dan Malaysia. Indonesia menentang tuduhan tersebut. Pernyataan ini direspon keras oleh Menlu Subandrio pada tanggal 21 januari 1963.³ Konferensi solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika yang diselenggarakan di Tanganyika, Indonesia bersama delegasi Cina mengancam pembentukan federasi dan mendukung gerakan Kalimantan utara.

Pada tanggal 16 agustus 1963 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengirim misi untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua negara tersebut. Misi PBB ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keinginan dan pendapat rakyat Serawak dan Sabah mengenai gagasan pembentukan Federasi. Hal ini direspon oleh Tengku Abdul Rahman dengan mengumumkan penundaan peresmian pembentukan federasi pada dari tanggal 31 agustus menjadi 16 september 1963. Indonesia kemudian menanggapi dengan melakukan protes keras terhadap Malaysia. Sikap protes Indonesia ini memiliki alasan bahwa penundaan peresmian dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil keputusan penentuan pendapat rakyat oleh tim PBB. Sesuai dengan kekhawatiran Indonesia, pada tanggal 14

¹ Muhammad Yamin. 1953. *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan.. Hal. 189

² William H. Frederick dan Soeri Soeroto. 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 393

³ Subandrio's speech direct attack: Tengku, The Straits Times, 22 Januari 1963

September 1963 PBB telah mengumumkan hasil misi penentuan pendapat rakyat Sabah dan Serawak bahwa ternyata sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak menyetujui pembentukan federasi. Pengumuman hasil penentuan pendapat rakyat yang terkesan tergesa-gesa ini, akhirnya mendorong Indonesia dan Filipina untuk mengajukan keberatan mengenai keputusan tersebut. Selain itu, alasan keberatan yang diajukan Indonesia dan Filipina karena pendirian Federasi, tidak sesuai dengan Resolusi PBB No.1541 pasal 9 tentang kolonisasi dan dekolonisasi negara jajahan. Sayangnya upaya protes tersebut tidak ditanggapi oleh PBB. Proklamasi federasi Malaysia akhirnya diumumkan pada tanggal 16 September 1963.

Upaya Malaya yang kurang sportif tersebut, menimbulkan pertentangan bagi Indonesia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia telah dimulai dan kebijakan "Mengganyang Malaysia" secara formal diumumkan, tepat setelah diumumkannya proklamasi federasi Malaysia.

Konfrontasi diawali dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaya hingga konfrontasi ekonomi. Dalam upaya melaksanakan dan melancarkan konfrontasi dengan negara yang tergabung dalam Federasi Malaysia, Indonesia melalui presiden Soekarno menetapkan serangkaian kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah ini dikenal dengan "Kebijakan Mengganyang Malaysia." Kebijakan mengganyang Malaysia ini tidak hanya berupa pernyataan yang diberikan kepada rakyat agar mendukung pemerintah untuk menentang Federasi Malaysia, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang mengarah pada konfrontasi dari segi aspek ekonomi. Bentuk kebijakan lain diantaranya ialah pemutusan hubungan dagang Indonesia dengan Malaya dan Singapura, pengendalian perusahaan asing yang telah diambil alih oleh rakyat, hingga dedollarisasi Kepulauan Riau.

Kebijakan dalam mengganyang Malaysia ini, diinformasikan oleh pers sebagai media penyambung informasi antara pemerintah dan rakyat. Pemberitaan media cetak nasional mengenai kebijakan mengganyang Malaysia tersebut, sedikit banyak mampu mempengaruhi sikap dan animo rakyat dalam menanggapi kebijakan pemerintah tersebut. Berbagai aksi rakyat sebagai reaksi dari kebijakan konfrontasi dan propaganda mengganyang Malaysia juga tidak lepas dari peran pers terutama media cetak nasional dalam memberitakan kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pemberitaan media cetak dari surat kabar dan majalah nasional pada tahun 1963-1966 mengenai kebijakan ganyang Malaysia. Kebijakan-kebijakan pemerintah apa

saja yang diberitakan hingga dapat menimbulkan reaksi rakyat dalam merespon pemberitaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan ganyang Malaysia; (2) Bagaimana pemberitaan media cetak nasional tentang kebijakan ganyang Malaysia; (3) Bagaimana dampak pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia terhadap masyarakat Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah dilakukan berdasarkan empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode ini diawali dengan mengumpulkan sumber atau dalam sejarah disebut dengan heuristik. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini yakni mengumpulkan sumber-sumber primer berupa pemberitaan-pemberitaan media cetak dari surat-surat kabar dan majalah nasional yang sejaman seperti *Suluh Indonesia*, *Merdeka*, *Warta Bhakti*, *Kompas*, *Sinar Harapan* dan media cetak lain yang beredar di Surabaya seperti majalah *Sket masa*. Sumber sekunder berupa buku-buku refrensi yang relevan. Penelusuran sumber dilakukan di Perpustakaan Nasional Indonesia, Arsip Nasional RI (ANRI), Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Daerah Jawa Timur, dan Perpustakaan Medayu Agung.

Langkah kedua dari metode sejarah ialah melakukan kritik Sumber. Kritik sumber yakni kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Peneliti melakukan kritik intern dengan meneliti keabsahan sumber yang diperoleh, mengkritisi isi sumber atau data, diteliti, dibandingkan, diolah hingga ditemukan sebuah fakta. Proses kritik intern dilakukan dengan membandingkan kecocokan dan kesesuaian antara pemberitaan yang diinformasikan oleh koran maupun majalah yang didapat dengan sumber sekunder yang sesuai dengan tema guna mendapatkan hasil berupa fakta yang valid. Sumber pendukung baik dari sumber penulis asing maupun penulis lokal dapat saling melengkapi dalam penulisan sejarah tersebut.

Langkah ketiga yakni interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari sumber-sumber yang telah melewati tahap kritik sumber. Peneliti pada tahap interpretasi berusaha membentuk fakta-fakta yang kredibel, menjadi suatu kesatuan yang logis.

Pada tahap ini makna ditentukan dari hubungan fakta-fakta sehingga terbentuk rangkaian kisah maupun peristiwa. Fakta-fakta sejarah berupa pemberitaan pers tentang kebijakan ganyang Malaysia digunakan penulis untuk menentukan makna dari hubungan fakta sejarah

antara peristiwa konfrontasi, kebijakan pemerintah yang diberitakan pers, serta pengaruh dari pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia terhadap stabilitas politik, ekonomi dan sosial Indonesia pada masa itu. Peneliti juga berusaha menggali keterkaitan fakta-fakta dengan mencocokkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. Dengan demikian rumusan masalah diharapkan dapat terjawab, dan kemudian dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah terakhir dalam penelitian ini ialah Historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan proses merekonstruksi fakta-fakta masa lampau, sehingga terbentuklah tulisan sejarah yang runtut, kronologis dan sesuai berdasarkan penulisan sejarah yang benar. Dalam tahap terakhir ini, peneliti menyusun sebuah penelitian sejarah mengenai Pemberitaan Media Cetak Nasional tentang Kebijakan Ganyang Malaysia tahun 1963-1966.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ganyang Malaysia ditengarai adanya pembentukan Federasi Malaysia. Gagasan Pembentukan Federasi Malaysia dikemukakan oleh PM. Malaya, Tengku Abdul Rahman pada tanggal 27 Mei 1961, di depan wartawan yang tergabung dalam *Foreign Journalist Association*. Gagasan pembentukan federasi ini juga sempat dimusyawarahkan selama berturut-turut dalam konferensi di Singapura, yang disebut dengan Konferensi Konsultatif Kesetiakawanan Malaysia.⁴ Gagasan pembentukan federasi Malaysia mencakup negara Malaya, Singapura, Brunei, Serawak dan Sabah.⁵

Pembentukan federasi Malaysia mendapat protes dari Indonesia. Penentangan Indonesia tersebut disebabkan karena proses pembentukan federasi yang menurut Indonesia tidak sesuai dengan hasil penentuan pendapat rakyat dan resolusi PBB No.1541 pasal 9 tentang kolonisasi dan dekolonisasi negara jajahan, yang juga tercantum dalam isi perjanjian KTT Maphilindo di Manila.⁶

Sesuai peresmian Federasi Malaysia, hubungan antar kedua negara semakin keruh. Proklamasi Federasi Malaysia diterima Indonesia sebagai adanya iktikad buruk (act of bad faith) pihak Malaya, atau semacam tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) terhadap bangsa Indonesia.⁷ Sejak saat itu konfrontasi Indonesia

dengan Malaysia benar-benar telah dimulai dan praktis Kebijakan “Mengganyang Malaysia” secara formal diumumkan bertepatan setelah diumumkannya Federasi.

Kebijakan Ganyang Malaysia oleh pemerintah RI juga diwartakan dalam beberapa media cetak Nasional. Berikut pemberitaan kebijakan yang dihimpun peneliti dari berbagai sumber surat kabar dan majalah nasional.

A. Surat kabar

1. Suluh Indonesia (Sulindo)

a. RAKJAT AA: DUKUNG REVOLUSI KAL. UT. KSRAA III BERAKCHIR

“diserukan supaya rakjat2 Asia-Afrika mendukung revolusi di Kalimantan Utara melawan “setiap federasi jang sekarang setjara intensif sedang dilaksanakan oleh kaum imperialis jang bekerdjasama dengan agen2 mereka.”⁸

Sulindo pada berita ini yang menunjukkan sikap pro dengan kebijakan pemerintah, berusahaewartakan himbuan kepada pembaca yakni masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah RI dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Kalimantan Utara. Sulindo sebagai surat kabar yang menjadi pelaku propaganda pemerintah RI berusaha meyakinkan para pembaca untuk menerima programnya agar pembaca senantiasa ikut serta dan turut mendukung program politik konfrontasi tersebut. Dalam teori komunikasi disebut dengan *Bandwagon*.⁹ Pemberian label oleh redaktur Sulindo nampak jelas terlihat dengan menyebut Malaya sekutu negara Imperialis (Inggris) dengan istilah “agen-agen”

b. “Tanpa Tedeng Aling-Aling akan Ganyang Malaysia”¹⁰

Pakan Baru, 19 Okt. (Antara): -Wampa/ Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio mengatakan bahwa hendaknja Tengku Abdul Rachman mengetahui bahwa Indonesia tanpa tedeng aling-aling akan mengganjang apa jang disebut “Malaysia” itu.

Berbitjara didepan suatu rapat raksasa di Pakan Baru hari Sabtu pagi Dr. Subandrio mengemukakan bahwa perjalanannja keliling Sumatera sekarang ini, adalah djustru untuk mengganjang apa jang disebut “Malaysia” itu.

⁴ Sket masa, No. 12, Th. V, 1 April 1962. Hlm.12

⁵ Frans S. Fernandes. 1968. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud. Hlm. 156

⁶ Marwati Joened dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka. Hlm. 357

⁷ Hidayat Mukmin. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: C.V. Muliasari. Hlm. 96

⁸ Suluh Indonesia, 13 Februari 1963

⁹ *Bandwagon*; memiliki tema, Setiap orang - paling tidak kita semua - sedang melakukannya; dengannya, para pelaku propaganda berusaha meyakinkan kita bahwa semua anggota suatu kelompok dimana kita menjadi anggotanya menerima programnya dan oleh karena itu kita harus mengikuti kelompok kita dan “menggabungkan diri dalam kelompok itu”. Lee and Lee, 1939 dalam Werner J. severin dkk. 2009. *Teori Komunikasi, Sejarah, metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁰ Suluh Indonesia, 21 Oktober 1963

Sulindo dalam *headline*-nya menunjukkan bahwa berita ini berlatar suasana rapat raksasa dalam perjalanan Menlu Dr. Subandrio keliling daerah-daerah di Pulau Sumatra. Unsur penekanan yang ingin ditunjukkan pada berita ini sudah dijelaskan pada *lead*.¹¹ Kata “Tanpa Tedeng aling-aling” mengesankan bahwa pemerintah RI akan bersikap secara terbuka dan terang-terangan dalam berkonfrontasi dengan negara Federasi yang dinamakan Malaysia. Berita ini menjadi kurang berimbang sebab dalam berita tersebut hanya dipaparkan pernyataan-pernyataan dan argumen Dr. Subandrio mengenai kekhawatirannya terhadap kondisi Asia Tenggara bila berada ditangan pihak asing. Pihak asing disini yang dimaksudkan ialah pihak negara-negara adikuasa dan sekutu. Pernyataan tersebutlah yang melandasi pentingnya menjalankan politik konfrontasi terhadap federasi Malaysia. Sedangkan hasil rapat dan bentuk program pengganyangan “Malaysia” sebagai upaya konfrontasi, tidak dipaparkan secara jelas.

c. “Sikap RI Tetap dalam Hadapi Malaysia”

Djakarta, 2 Mei (Sulindo R6-R8 Ant), - Sekarang untuk Indonesia sikap dan jawaban Tengku Abdul Rachman sudah djelas. Sikap Indonesia masih tetap akan menghadapi apapun jang akan terdjadi sebagai akibat dari politik konfrontasi terhadap apa jang dinamakan “Malaysia” itu.

*Mereka mengirim sepuluh orang kedalam wilajah Indonesia, kita akan kirim seratus orang sukarelawan, dan djika mereka mengirim seratus orang kedalam wilajah kita, kita akan mendjawabnja dengan serbuan seribu orang sukarelawan. Djangan kanja menghadapi satu pemimpin seperti Tengku Abdul Rahman, menghadapi seratus orang pemimpin seperti Tengku Abdul Rahman sekalipun Indonesia tidak akan gentar.*¹²

Berita ini berlatar pada pidato komando presiden dalam rapat raksasa dengan jutaan sukarelawan Indonesia. Berita yang mewartakan pidato komando tersebut terdiri dari kronologi pidato presiden. Nampak pidato yang disampaikan penuh dengan ungkapan propaganda yang bersifat konfrontatif, seperti yang paparkan dalam *lead*. Sulindo sebagai surat kabar nasional, terlihat jelas menjadi alat propaganda pemerintah. Berita yang diwartakan hampir sebagian besar mengandung muatan propaganda pemerintah. Fakta

mengenai laporan kebijakan kurang diwartakan secara detail dan actual dalam harian surat kabar ini.

d. Indonesia terus mengganjang “Malaysia”, Presiden Sukarno Peringatkan Dubes Jones

*Djakarta, 11 Mei (Sulindo/R-2): - Wkl. PM. Menlu Dr. Subandrio dalam keterangannya hari sabtu jl. Menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat menjimpang dari pelaksanaan pengganjangan thd. projek neokolonialisme British-Malaysia jg sekarang ini masih terus berdjalan dan mengharapkan agar hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tidak sampai bertumbuh kearah ketegangan sebagai akibat dari pada pelaksanaan pengganjangan thd Malaysia.*¹³

Berita ini berlatar tentang keterangan Menlu Subandrio se usai mendampingi presiden Sukarno dalam acara pertemuan dengan Dubes AS, Howard P. Jones. *Lead* memaparkan pendapat Menlu Subandrio yang berharap agar pelaksanaan politik konfrontasi tidak mempengaruhi hubungan kerjasama RI dengan AS. Pendapat yang mengandung harapan tersebut, dipicu oleh adanya desas desus ancaman pejabat AS tentang penghentian bantuan pada RI bila tetap menjalankan politik konfrontasi terhadap Malaysia. pihak redaksi dalam menyampaikan berita ini, terkesan kontradiktif. Keterangan menlu Subandrio ini, kontra dengan reaksi yang diberikan Presiden Sukarno. Presiden Sukarno menanggapi hal tersebut dengan memberikan peringatan dengan ungkapan “*go to hell with your aid*” yang bermakna pengabaian bantuan dan keteguhan dalam berkonfrontasi. Redaktur berita nampaknya juga sependapat dengan sikap presiden. Hal ini ditandai dengan menyebut tekanan pihak AS dengan pemakaian frasa “*irama mineur*” atau dalam istilah saat ini yakni “*irama minor*” yang berarti ungkapan atau pernyataan sebagai ancaman maupun tekanan yang dirasa tidak penting. Paragraf akhir berita menyampaikan info pemanggilan Menlu Subandrio terkait keterangannya yang bersifat kontra dengan presiden Soekarno. Namun pihak redaktur belum mendapat sumber info yang detail mengenai kronologi acara pemanggilan tersebut.

2. Merdeka

a. “Putus Hubungan Dagang dengan Singapura”¹⁴

Berita ini berlatar mengenai sidang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTI) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Isi berita ini juga tentang apa saja

¹¹ Lead (leed) adalah kata-kata pembukaan, teras berita, biasanya pernyataan ringkas kurang dari 40 kata. Lead terletak pada paragraf pertama yang mengandung gambaran umum suatu berita. Tom E Rolnicki. 2008. *Pengantar Dasar Jurnalisme. Terjemahan Triwibowo*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm. 414

¹² Suluh Indonesia, 2 Mei 1964

¹³ Suluh Indonesia, 11 Mei 1964

¹⁴ Merdeka, 17 September 1963

yang dihasilkan dalam sidang KOTI tersebut. Dalam sidang itu, berita ini menginformasikan bahwa Indonesia akan membuktikan politik konfrontasi dalam bidang ekonomi yang ditandai akan melakukan pemutusan hubungan dagang dengan Singapura. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya kongkrit terhadap Singapura yang telah menggabungkan diri dalam keanggotaan negara federasi Malaysia. Pemakaian ungkapan dalam frasa “tindakan drastis” merupakan bentuk penekanan yang menunjukkan kemantapan sikap Indonesia yang telah tegas menolak pembentukan Malaysia. Rencana pemutusan hubungan dagang pada Singapura tersebut, menandai terbentuknya kebijakan konfrontasi ganyang Malaysia dalam bidang ekonomi.

b. “Presiden Instruksikan: Panitia 11 KOTI Ekonomi Rumuskan Konfrontasi Dengan Malaysia, HASILNJA HARUS DILAPOR DALAM PLENO KOTI TGL 21 SEPT.JAD.”

Djakarta, 18 September (Merdeka)

PRESIDEN/Panglima Tertinggi Soekarno selaku Panglima Tertinggi Komando Operasi Ekonomi seluruh Indonesia, kemarin siang telah memberikan instruksi kepada staf Koti Ekonomi untuk membentuk suatu panitia dalam rangka mengadakan konfrontasi dengan Malaysia dan merumuskan tindakan-tindakannya.¹⁵

Latar info dalam berita ini ialah sidang KOTI yang dipimpin oleh presiden sekaligus Panglima tertinggi KOTI seluruh Indonesia Presiden Soekarno. Berita ini hanya menginformasikan pembentukan panitia 11 yang nantinya akan menjalankan instruksi-instruksi dari presiden beserta duta besar-duta besar perwakilan RI yang turut menjadi tamu undangan. Tidak ada penggambaran yang jelas mengenai jalannya proses sidang, instruksi-instruksi apa saja yang diturunkan hingga deskripsi kerja masing-masing. Nampaknya sumber diperoleh wartawan dalam meliput sidang masih kurang, sehingga berita yang disampaikan terkesan kurang lengkap.

c. “Komando Presiden Soekarno: Para Pedagang-Pengusaha Supaja Taati & Laksanakan Putusan Bogor, Untuk Realisir Konfrontasi Dibidang Ekonomi Dengan Malaysia”

Pengumuman amanat Presiden Sukarno itu lengkapnja sbb: I. Dalam merealisasikan konfrontasi rakjat Indonesia dalam bidang Ekonomi terhadap apa jang menamakan dirinja (Malaysia), sebagai Presiden-Panglima Tertinggi APRI (Bersendjata)-Panglima Besar Tertinggi

Operasi Ekonomi, telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. *Memutuskan segala hubungan lalu lintas erekonomian dengan daerah2 jang menamakan diri (Malaysia), terutama Malaya dan Singapura,*
2. *Merupiahkan (dedolarisasi) daerah Kepulauan Riau, dan*
3. *Mengamankan setjara integral pelaksanaan kedua putusan tsb diatas.¹⁶*

Berita pada edisi ini berlatar pada Amanat Presiden yang disampaikan melalui Sekretaris MPPR (Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi). Dalam berita tersebut, diinformasikan amanat-amanat presiden tentang realisasi konfrontasi dibidang ekonomi terhadap Malaysia. Selain informasi mengenai amanat-amanat presiden yang mengandung kebijakan konfrontasi, berita ini juga menyampaikan himbauan pada seluruh aparaturnegara untuk saling bersinergi dalam menjalankan amanat tersebut. Perintah untuk melaksanakan putusan tersebut juga disampaikan, khususnya ditujukan pada para pedagang dan pengusaha selaku para pelaku ekonomi. berita ini hanya menyajikan fakta terkait laporan amanat presiden. Unsur opini dari pihak redaksi tidak ada dalam berita ini.

d. “Tidak Boleh Kirim Minjak Ke Malaysia”¹⁷

Berita ini berlatar laporan pusat relawan departemen Perdatam. Isi berita mengabarkan tentang instruksi Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan (Perdatam). Instruksi yang ditujukan pada seluruh Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang ada di Indonesia tersebut, berisi pelarangan untuk tidak mengirimkan minyak dan gas bumi pada daerah yang masuk pada keanggotaan federasi Malaysia. berita ini juga menyampaikan sebab-sebab dan pertimbangan dari instruksi pelarangan tersebut. Berita yang terdiri dari dua paragraf ini, tidak memiliki *lead* berita. Baik opini maupun pesan khusus dari redaksi tidak ada dalam berita tersebut

3. Warta Bhakti

a. Presiden Sukarno tegaskan: Indonesia Tidak Gentar! Atas Bantuan Militer AS Kepada “Malaysia”

Djakarta, 9 maret (Warta Bhakti).

Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno dalam amanatnja pada peringatan Hari Wanita Internasional jang diselenggarakan oleh Kowani di Istana Negara Senin malam menegaskan, bahwa rakjat Indonesia jang dalam perjoangannya melawan nekolim tidak kenal

¹⁵ Merdeka, 18 September 1963

¹⁶ Merdeka, 24 September 1963

¹⁷ *Ibid.*,

*kompromi tidak menjadi takut dan gentar dengan diberikannya "active aids" oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain kepada apa yang dinamakan "Malaysia", karena mereka akan kita hadapi dengan kekuatan internasional pula, yakni solidaritas antara bangsa-bangsa Nefo yang berkekuatan sebesar 2500 djuta manusia.*¹⁸

Berita ini berlatar pada peringatan Hari Wanita Internasional oleh Kowani di Istana Negara. Lead mendeskripsikan jalannya proses acara peringatan hari wanita internasional ini sebagai berita yang sarat dengan alat propaganda. Pada acara peringatan hari wanita internasional tersebut, presiden menyampaikan amanat yang berusaha meyakinkan keteguhan perjuangan rakyat Indonesia yang tidak takut dengan isu desas desus bantuan aktif Amerika terhadap Malaysia. Selain penulisan lead yang sarat dengan alat propaganda, penutup lead juga terkesan sangat provokatif dan bombastis, seperti dalam kutipan pernyataan berikut, "... karena mereka akan kita hadapi dengan kekuatan Internasional pula, yakni solidaritas antara bangsa-bangsa Nefo yang berkekuatan sebesar 2500 djuta manusia"

Unsur pencitraan terhadap seorang tokoh juga mewakili subjektifitas redaktur dalam memberitakan peristiwa ini. Seperti pernyataan berita yang menyoroti istri menlu Subandrio, Dr. Ny. Hurustiati Subandrio menyerahkan sumbangan secara simbolis kepada rakyat Vietnam utara dan Kalimantan Utara. Surat kabar Warta Bhakti sebagai media cetak yang berhaluan sosialis dan pro presiden sangat nampak dalamewartakan beritanya. Berikut cuplikan beritanya,

Dikatakan oleh presiden, bahwa gerakan-gerakan wanita international yang mentjita-tjitakan terbentuknja masjarakat sosialis dinegerinja masing-masing itu semula belum tergabung dan hidup sendiri-sendiri dinegeri masing-masing."

Propaganda sosialis nampak jelas dalam berita ini daripadaewartakan esensi visi misi Kowani itu sendiri dalam rangka peringatan hari wanita internasional. Penutup berita sekali lagi tidak fokus pada esensi berita. Namun justru pada pernyataan Menlu Subandrio terkait sikap Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik konfrontasi dengan Malaysia.

b. Presiden Sukarno tegaskan lagi: Indonesia Tolak Penarikan Geriljawan-Geriljawan Untuk Berunding

Djakarta, 10 Maret 1965 (W. Bhakti)

Presiden Sukarno menegaskan kepada seluruh dunia bahwa rakjat Indonesia tetap akan menolak andaikata ada usul yang menghendaki agar

*supaya geriljawan-geriljawan Indonesia ditarik terlebih dahulu dari daerah perbatasan sebagai prasarat untuk diadakannya perundingan guna menyelesaikan masalah negara boneka "Malaysia" setjara damai.*¹⁹

Berita ini berlatar pernyataan presiden dalam menanggapi desas desus upaya penyelesaian sengketa Malaysia oleh pihak Malaya. Berita ini sangat menonjolkan opini Presiden Sukarno dalam merespon persoalan konfrontasi dengan Malaysia. Dominansi pemikiran presiden dalam menjalankan politik kebijakan konfrontasi, sangat jelas tergambar pemberitaan media cetak ini. Berita ini selainewartakan penekanan sikap konfrontasi RI terhadap Malaysia, juga menginformasikan tentang jalan alternatif penyelesaian sengketa Malaysia menurut pemikiran presiden secara personal, bukan berdasarkan pada kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah mufakat antara aparaturnegara dan rakyat Indonesia sendiri khususnya.

Selain pernyataan presiden, media cetak ini jugaewartakan sambutan Menlu subandrio terkait desas-desus pihak Malaya yang akan mengadakan perundingan guna menyelesaikan negara boneka Malaysia. Penggunaan idiom "negara boneka" pada Malaysia merupakan bentuk pemberian label buruk pada citra negara Malaysia. Pernyataan berita yang mengandung muatan bersifat provokatif juga terlihat dalam cuplikan pernyataan Menlu yang diwartakan dalam harian ini sebagai berikut,

"Achir-achir ini pihak Tengku Abdul Rachman senantiasa melantjarkan kata-kata penghinaan terhadap Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Selama pihak Tengku lantjarkan penghinaan-penghinaan terhadap Bapak Rakjat Indonesia itu, selama itu pula umat Islam Indonesia dan seluruh rakjat Indonesia tidak akan melepaskan Bung Karno untuk pergi berunding dengan Tengku Abdul Rachman."

Penutup berita juga tidak luput perihal mengenai penekanan sikap RI terhadap penyelesaian negara Malaysia.

4. Kompas

Sikap Indonesia terhadap PBB.²⁰

Berita harian ini berlatar pada suatu wawancara Dubes Indonesia untuk Amerika serikat dengan wartawan Antara di New York. Berita yang terdiri dari empat paragraf yang cukup singkat iniewartakan bagaimana sikap dan pendirian RI terkait isu pengajuan kembali RI sebagai keanggotaan PBB. Pendirian dan sikap RI yang

¹⁸ Warta Bhakti, 9 Maret 1965

¹⁹ Warta Bhakti, 10 Maret 1965
²⁰ Kompas, 1 Desember 1965

tetap memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB disampaikan oleh Dubes L.N. Palar.

Berita ini juga mewartakan sebab alasan sikap RI yang tetap keluar dari PBB. Alasan tersebut mengandung penekanan bahwa pendirian Indonesia untuk tetap keluar dari PBB merupakan murni alasan internal dari pihak RI sendiri, bukan disebabkan oleh berakhirnya Malaysia dalam keanggotaan dewan keamanan PBB. media cetak ini cukup objektif dalam mewartakan berita ini. Berita yang diwartakan hanya berupa fakta-fakta penting yang saling menunjukkan hubungan antara paragraf yang satu dengan yang lain.

Dua paragraf sebagai penutup berita, redaktur juga ingin menyampaikan pesan mengenai harapan pemerintah RI dan alasan perlunya diadakan perombakan piagam PBB. Pesan yang mengandung harapan agar perombakan PBB disesuaikan dengan pasal-pasal pendirian negara baru sebagai syarat yang logis, berusaha digambarkan dalam berita ini.

5. Sinar Harapan

Dr. Subandrio Tentang Penyelesaian Persengketaan Lawan Malaysia: Perundingan dengan Wakil Pemerintah Kuala Lumpur, Singapura Beserta Wakil Rakjat Sabah, Serawak, Brunei, Kaltara

Djak, 9 Des (SH)

Wakil PM I/Menlu Dr. Subandrio mengatakan bahwa dalam keadaan sekarang perjuangannya konfrontasi terhadap Malaysia dalam menjari penyelesaian damai sudah agak berubah dengan keadaan yang lampau, yaitu dengan sudah pisahnja Singapura dari Malaysia dan adanya gerakan kemerdekaan di Serawak dan Sabah.²¹

Berita ini berlatar pada pernyataan dan tanggapan Menlu RI terkait sikap pihak Malaya mengenai penyelesaian sengketa Malaysia. Kebijakan politik konfrontasi terhadap Malaysia yang sudah mulai melunak, berusaha ingin disampaikan redaktur dalam pemberitaan pernyataan Menlu Subandrio tersebut. Sikap lunak tersebut bukan tanpa syarat. Hal ini ditengarai oleh keluarnya Singapura dari keanggotaan federasi Malaysia dan adanya pernyataan Tengku Abdul Rachman yang wacananya bersedia untuk melakukan perundingan. Usaha penyelesaian secara damai mulai nampak seperti yang tersirat dalam usulan yang disampaikan Menlu Subandrio agar melaksanakan perundingan dengan menyertakan wakil-wakil dari pemimpin rakjat Sabah, Serawak, Brunei dan Kaltara.

Pada penutup berita, paragraf ini sayangnya mengandung penekanan yang justru bersifat kontradiktif dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Kutipan berita

tersebut sebagai berikut, “*Atas pertanjaan bahwa dengan demikian bukan berarti sekarang sikap konfrontasi kita berubah.*” Paragraf penutup ini kontradiktif dengan pernyataan sikap bersedianya pihak RI untuk berunding dalam penyelesaian sengketa Malaysia. Dengan demikian akan dapat menimbulkan pertanyaan dan kesan ambigu bagi para pembaca.

B. Majalah

Sket Masa

a. Karena Penjelmaan Neo-Kolonialisme: *Down With Malaysia*²²

Lead memperlihatkan bagaimana propaganda perjuangan Kalimantan Utara untuk melawan federasi Malaysia. Majalah Sket Masa dalam edisi ini ingin memperlihatkan alasan-alasan dan sebab-sebab pentingnya menolak pembentukan Malaysia. Subjektifitas redaktur berusaha menjelaskan bahwa pembentukan Malaysia bukan semata-mata ide dari Tengku Abdul Rachman saja tetapi juga tidak terlepas dari pemikiran dan ide dari negara induk yaitu Inggris. Dalam hal ini Tengku berusaha digambarkan sebagai tokoh politik yang ambisi ekspansionis. Pemakaian istilah “negara Tempe” yang meminjam istilah dari Bung Karno merupakan pelabelan terhadap negara Malaysia yang dicirikan sebagai negara yang remeh, lemah, cilik dan licik. Redaktur Sket masa dalam menulis artikel pada edisi ini benar-benar mengandung propaganda yang sering memakai kalimat yang bernada provokatif. Seperti cuplikan paragraf sebagai berikut.

“Memang, selama Tengku Abdulrahman – meski asal usulnja bukan aseli dari Malaya, melainkan dari Atjeh dan rencana paksaan Malaysianja masih ada, antjaman buat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lainnja pasti ada.”

Penutup diakhiri dengan paragraf propaganda yang penuh penekanan seperti yang dituliskan dalam cuplikan paragraf sebagai berikut,

“seperti ditekankan oleh Presiden Sukarno: “Tandas-tandas Indonesia terang-terangan anti Malaysia, karena maksud pembentukan Malaysia adalah hasil pikiran, penjaluran dalam penjelmaan neo-kolonialisme.”

Dalam bahasa Inggris tidak salah kita serukan: *Down With Malaysia!* (Runtuhkan Malaysia)

b. Pemutusan Hubungan Ekonomi Dengan “Malaysia”²³

Headline ini berlatar pada hasil wawancara redaktur majalah Sket Masa dengan Menteri Perindustrian Rakyat. Lead pada headline edisi ini

²¹ Sinar Harapan. 10 Desember 1965

²² Sket Masa No. 11 Th. VI, 1 Maret 1963. Hlm. 9

²³ Sket Masa. No.8 Th. VII – 1964, 30 Januari 1964. Hlm. 28

memperlihatkan apabila kebijakan konfrontasi ekonomi dengan Malaysia dijalankan akan memberikan keuntungan dibidang ekspor. Berita headline ini berisi kronologi yang diawali dengan pemaparan keuntungan-keuntungan dari ekspor hasil bumi apa saja bila ekspor dijalankan sendiri oleh pemerintah RI tanpa melalui Singapura maupun Malaya. Hal ini mengandung pesan yang persuasif kepada pembaca agar turut mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah ini. Setelah pemaparan mengenai keuntungan-keuntungan dalam pelaksanaan pemutusan hubungan ekonomi dengan Malaysia, redaktur juga memaparkan mengenai kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program pemutusan hubungan ekonomi ini. Hal ini dapat menyebabkan perubahan persepsi pembaca yang semula yakin mendukung kebijakan tersebut, menjadi ragu-ragu dengan fakta kondisi lapangan yang digambarkan tersebut. Paragraf selanjutnya redaktur juga memperlihatkan kondisi perdagangan Singapura dan kelicikan-kelicikan yang dilakukan pihak Singapura dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia. Paragraf ini tentu saja sangat menyoroti dan memojokkan Singapura. Dalam paragraf tersebut seolah-olah dijelaskan bahwa semua para tengkulak hasil bumi Indonesia yang menjalankan bisnis secara licik itu berasal dari Singapura. Informasi ini tentu saja masih perlu dikaji dengan benar seperti apa fakta sesungguhnya. Pada paragraf-paragraf terakhir diperlihatkan pula dampak pelaksanaan program pemutusan ekonomi tersebut terhadap pihak Singapura. Dampak-dampak tersebut ialah berupa laporan tokoh pimpinan pengusaha Singapura yang memprediksi perekonomian Singapura akibat dampak pemutusan ekonomi oleh Indonesia.

Pemberitaan media cetak nasional yang bertemakan Kebijakan ganyang Malaysia, diinformasikan media baik berupa pemberitaan perihal laporan kebijakan, progress laporan kebijakan, hingga berita yang bermuatan propaganda kebijakan. Pemberitaan yang telah diinformasikan tentu saja menimbulkan dampak bagi pembaca, umumnya masyarakat. Dampak pemberitaan juga diinformasikan oleh media. Dampak pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia ialah sebagai berikut:

a. Aksi Corat-coret Massa

Tjorat Tjoret Anti Malaysia

Hari itu adalah hari yang penuh tjorat tjoret dan kenangan. Dikatakan penuh tjorat-tjoret dan penuh kenangan karena itu adalah fakta. Tiap pengundjung yang datang dari setiap pelosok membandjiri lapangan Merdeka tidak akan luput dari tjorat tjoret yang membungai setiap dinding,

*setiap tembok, setiap djalan dan setiap djalan, ruang atau tempat jang mungkin bisa di tulisi.*²⁴

Di Indonesia, daerah-daerah seperti Medan, masyarakatnya melakukan aksi corat-coret yang menunjukkan sikap anti Malaysia. Aksi corat-coret ini menandakan reaksi masyarakat Medan terhadap konfrontasi sebagai pencerminan sikap anti Malaysia.

Gedung konsulat Malaya, Inggris dan Amerika serikat tidak luput dari sasaran aksi corat coret. Seperti yang juga diberitakan dalam majalah Sket Masa sebagai berikut.

*Adalah sangat menarik pula, bahwa tulisan2 serupa itu dgn sengadja ditulis besar2 dimuka gedung konsulat Malaja, Inggris dan Amerika Serikat. Misalnja pada tulisan jang berbunji al. sebagai berikut: USA go home!—USA, don't help Malaysia! sedang dimuka gedung PTM Malaja antara lain berbunji: Malaysia neokolonialisme.*²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemberitaan media cetak nasional mengenai kebijakan Ganyang Malaysia mampu menyedot perhatian massa untuk turut mendukung kebijakan tersebut, meskipun dengan cara yang kurang sportif.

b. Demonstrasi pemuda

Di Surabaya juga terjadi demonstrasi-demonstrasi pemuda. Sebuah surat kabar tanah air juga turut memberitakan situasi kota Surabaya pada saat itu, sebagai berikut.

Konsulat AS Surabaya djuga Didemonstrasi Arek2

*Barisan pemuda-peladjar dan mahasiswa jang diikuti oleh buruh dan tani jang berdjumlah 10.000 orang, hari senin siang djam 12.00 telah berdemonstrasi ke kediaman konsulat AS di djalan Dr. Soetomo, guna menjatakan mengutuk sekeras2nja perlakuan biadab pemerintah AS terhadap rakjat Republik Vietnam. Para demonstran "Arek2 Surobojo" itu melalui delegasinja sebanjak 8 orang jang diperbolehkan masuk ke kediaman konsulat AS telah menjatakan akan mengambil alih perusahaan2 AS jg ada di Indonesia bila ternjata Pemerintah AS meneruskan politik agresinja di Asia-Afrika dan Amerika Latin.*²⁶

Demo pemuda-pelajar yang terjadi di Surabaya merupakan suatu bentuk implementasi terhadap bentuk reaksi pemberitaan kebijakan konfrontasi terhadap negara boneka kolonialisme serta negara kolonialis pembentuknya. Tindakan sekutu negara kolonialisme

²⁴ Sket Masa, No. 21, Th. VI – September 1963. Hlm.14

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 15

²⁶ Warta Bhakti, 16 Februari 1965

seperti Amerika Serikat mengenai agresi terhadap Republik Vietnam, juga tidak luput dari kecaman.

c. Rapat-rapat Raksasa

Sementara itu, di Sulawesi Utara juga tengah bergolak. Daerah Toli-Toli telah diadakan rapat-rapat raksasa. Rapat ini diadakan untuk menggalakkan upaya mengganyang Malaysia. Surat Kabar Nasional memberitakan sebagai berikut.

Rapat Gantang Malaysia di Toli-Toli

Di kota Toli2, Sulawesi Utara, pada hari Senin jang baru lalu telah diadakan sebuah rapat raksasa mengganyang Malaysia.

Rapat jang dihadiri oleh sepuluh ribu penduduk daerah itu dan sekitarnya, telah menjatakan dukungannya dan akan melaksanakan dengan konsekwen segala tindakan dari pemerintah dalam rangka konfrontasi dengan projek neo-kolonialisme Malaysia.²⁷

Dukungan rakyat terhadap kebijakan pemerintah khususnya kebijakan konfrontasi dengan proyek neokolonialisme Malaysia juga ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Utara yakni daerah Toli-Toli. Dukungan rakyat tersebut ditunjukkan dengan mengadakan rapat raksasa yang isinya menolak segala bentuk neo-kolonialisme.

d. Dukungan Organisasi Massa

Dampak pemberitaan konfrontasi dan kebijakan Ganyang Malaysia juga dirasakan oleh organisasi-organisasi keagamaan. Semangat revolusi mengganyang proyek-proyek nekolim juga mengilhami organisasi-organisasi keagamaan. Salah satunya yaitu organisasi Nahdhatul Ulama (NU).

STATEMENT PB-NU: "Rapatkan Barisan"

Berkenaan dengan semakin nekadnja Tengku Abdul Rahman Putera dalam iktiarnya untuk menegakkan apa jang dinamakan "Malaysia" dengan merongrong persatuan jang bulat dikalangan bangsa Indonesia sekarang ini.

Pengurus Besar Partai, "Nahdhatul Ulama" dalam statemennja hari selasa mengadjak segenap lapisan rakjat Indonesia untuk tidak menghiraukan segala provokasi jang sangat berbisa itu.

PB-NU achirnja mengadjak rakjat Indonesia untuk tetap waspada, sesuai dengan Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia Bung Karno jang telah diutjapkan pada hari Angkatan Perang 5 Oktober.²⁸

²⁷ Suluh Indonesia, 11 Oktober 1963

²⁸ Suluh Indonesia, 10 Oktober 1963

Pengurus besar Nahdhatul Ulama, dalam sebuah Surat kabar tersebut mengajak rakyat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi mengingat situasi konfrontasi ganyang Malaysia yang sangat rentan timbul konflik.

e. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing

Di Palembang, Perusahaan minyak Inggris (Shell) diambil alih oleh buruh. Pemogokan dan pemboikotan perusahaan milik Inggris dan campuran Inggris juga dilakukan oleh para buruh.²⁹ Nasionalisasi yang sempat dilakukan oleh para buruh Indonesia diinformasikan dalam surat kabar nasional sebagai berikut.

PT. Shell Pladju Dikembalikan

"Seperti diketahui, pada tgl 18 September jl, oleh kaum buruh minjak jang dipelopori oleh KBKI (DPS) dan didukung oleh serikat2 buruh lainnya, PT Shell Indonesia Pladju dan Prabumulih telah diambil alih. Kemudian pengambil alih telah menjerahkan kepada pemerintah daerah Tk.I Sumatra Selatan jang diterimakan oleh tjatur tunggal tk. I setempat.

Dalam perkembangan selanjutnja sesuai surat Wampa-Pertadam Chaerul Saleh dan ketentuan dari keputusan KOTI No 001-1063, pada tanggal 19September sore kekuasaan jang diambil alih itu telah dikembalikan oleh tjatur tunggal Tk. I Sumsel kepada pimpinan PT. Shell Indonesia Pladju P.A.F. de la Calle."³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan Ganyang Malaysia dilatarbelakangi oleh pembentukan Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Malaya dan Inggris. Federasi Malaysia merupakan penggabungan antara negara-negara bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Pembentukan federasi mendapat penentangan dari Indonesia, karena pembentukannya dianggap telah menghalangi revolusi Indonesia yang anti neokolonialis dan imperialis.

Pembentukan federasi diproklamkan pada tanggal 16 September 1963. Pasca diresmikannya Federasi Malaysia, hubungan antar kedua negara semakin keruh. Indonesia memutuskan untuk melaksanakan politik konfrontasi. Politik konfrontasi ditandai dengan membentuk kebijakan mengganyang Malaysia.

Pers merupakan alat komunikasi massa yang berfungsi memberikan berita dan opini pada masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam melaksanakan program kebijakan ganyang Malaysia tahun 1963-1966,

²⁹ Sket Masa, No. 23. Th. VI. 15 September 1963

³⁰ Merdeka. *Loc.Cit.*,

juga menggunakan media massa atau pers sebagai alat komunikasi massa. Pers khususnya media cetak dapat mengkomunikasikan pesan (berita dan opini) dengan cara yang cepat, meluas serta mampu mempengaruhi penerima pesan, yakni masyarakat. Pemerintah menggunakan media cetak nasional untuk menyampaikan kebijakan ganyang Malaysia pada masyarakat.. Pemberitaan mengenai kebijakan ganyang Malaysia yang disampaikan media cetak nasional yakni berupa laporan kebijakan, progress pelaksanaan kebijakan hingga propaganda kebijakan.

Media cetak nasional khususnya surat kabar dan majalah yang digunakan penulis sebagai sumber primer pada penelitian ini diantaranya ialah Suluh Indonesia (Sulindo), Merdeka, Kompas, Warta Bhakti, Sinar Harapan dan majalah Sket Masa. Surat kabar dan majalah tersebut dalam memberitakan dan menyoroti kebijakan ganyang Malaysia, dipengaruhi oleh kiblat dan haluan redaksi surat kabar dan majalah itu sendiri. Diantara surat kabar dan majalah tersebut yang menunjukkan perbedaan mencolok dalam menyoroti kebijakan ganyang Malaysia ialah sebagai berikut:

Surat kabar nasional Suluh Indonesia (Sulindo) dalam memberitakan kebijakan ganyang Malaysia terlihat menunjukkan sikap pro terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan Sulindo merupakan surat kabar nasional yang berhaluan nasionalis dan menjadi alat politik serta terompet PNI. Kebijakan ganyang Malaysia yang sebagian besar tercetus dari ideologi dan pemikiran presiden Sukarno, diwartakan oleh Sulindo sebagai berita kebijakan yang sangat dominan dengan sudut pandang pemikiran presiden Sukarno. Hal ini nampak pada berita yang diterbitkannya pada edisi 21 Oktober 1963 yang berjudul “Tanpa *Tedeng Aling-Aling* akan *Ganyang Malaysia*” dan “Sikap RI Tetap dalam Hadapi Malaysia” pada edisi 2 Mei 1964.

Surat kabar harian Merdeka, merupakan surat kabar tanah air yang berhaluan nasionalis. Surat kabar ini dalam memberitakan kebijakan Malaysia berbeda dengan Sulindo. Sulindo yang memberitakan kebijakan tersebut sangat penuh dengan idealis presiden, berbeda dengan Merdeka yang beritanya tidak hanya menyoroti tentang kebijakan yang berlandaskan pemikiran-pemikiran presiden, tetapi juga memberitakan fakta berupa laporan-laporan hasil musyawarah presiden dengan aparaturnegara, seperti dalam pembentukan panitia 11 Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Merdeka sebagai surat kabar nasional, bersikap pro namun tetap objektif dalam menyampaikan beritanya. Hal ini ditandai dengan contoh berita yang dimuat dalam hariannya yang berjudul “Putus Hubungan Dagang dengan Singapura pada edisi 17 September 1963 dan Progress Report Tentang

Konfrontasi Ekonomi: Senin Pagi diserahkan Kepada Presiden di Istana Bogor” edisi 5 Oktober 1963.

Surat kabar tanah air yang bermetamorfosa dari surat kabar Tionghoa menjadi surat kabar berbahasa Indonesia ialah harian Warta Bhakti. Surat kabar yang mengubah namanya dari Sin Po menjadi Warta Bhakti pada tahun 1962 ini, merupakan koran yang berhaluan komunis. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menyadari manfaat dan keuntungan bila mendukung politik konfrontasi, berusaha memanfaatkan keadaan untuk memperkuat kedudukannya dipemerintahan. Politik konfrontasi yang didukung penuh penuh oleh PKI, sehingga pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia yang diberitakan oleh Warta Bhakti penuh dengan pesan-pesan propaganda. Berita-berita yang dimuat bukan hanya mengandung konten propaganda, tetapi juga penuh dengan opini-opini yang provokatif. Berita-berita tentang pidato dan amanat presiden yang penuh dengan muatan propaganda konfrontasi sangat ditonjolkan dalam pemberitaan surat kabar ini. Hal ini tentunya malah menjadi bias terhadap isi putusan dalam kebijakan ganyang Malaysia itu sendiri. Contoh pemberitaan kebijakan yang mengandung muatan pesan bernada provokatif salah satunya yakni pada penerbitan warta bhakti edisi 10 maret 1965 yang berjudul “Presiden Sukarno tegaskan lagi: Indonesia Tolak Penarikan Geriljawan-Geriljawan Untuk Berunding.”

Majalah Sket Masa merupakan majalah nasional yang juga sangat pro dengan pemerintah. Headline-headline yang diwartakannya sering mengandung pesan propaganda dan sangat provokatif. Subjektifitas redaktur sangat menonjol dalam headline-headline yang dimuatnya. Redaktur majalah dalam memberitakan kebijakan ganyang Malaysia menggunakan bahasa yang bombastis dan terkesan hiperbola. Headline yang memuat tentang kebijakan ganyang Malaysia diantaranya ialah pada edisi No. 11 Th. VI, 1 Maret 1963 yang berjudul “Karena Penjelmaan Neo-Kolonialisme: *Down With Malaysia*” dan edisi No.8 Th. VII – 1964, 30 Januari 1964 yang berjudul Pemutusan Hubungan Ekonomi Dengan “Malaysia”

Pemberitaan kebijakan ganyang Malaysia yang diinformasikan oleh media cetak nasional diatas, mampu mempengaruhi pembaca, umumnya masyarakat. Pesan propaganda yang disampaikan pers dalam memberitakan kebijakan ganyang Malaysia menimbulkan reaksi luas pada masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, diantaranya yakni aksi corat-coret massa, demonstrasi pemuda, mengadakan rapat-rapat raksasa, dukungan organisasi massa dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu sosial yang melakukan study historis analitis mengenai peristiwa sejarah yang dikaji dari pemberitaan media massa.

Rolnicki, Tom E. 2008. *Pengantar Dasar Jurnalisme. Terjemahan Triwibowo*. Jakarta: Prenada Media Grup

Severin, Werner J. dkk. 2009. *Teori Komunikasi, Sejarah, metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yamin, Muhammad. 1953. *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Kompas, 1 Desember 1965
 Merdeka, 17 September 1963
 Merdeka, 18 September 1963
 Merdeka, 24 September 1963
 Sinar Harapan, 10 Desember 1965
 Suluh Indonesia, 13 Februari 1963
 Suluh Indonesia, 11 Oktober 1963
 Suluh Indonesia, 10 Oktober 1963
 Suluh Indonesia, 21 Oktober 1963
 Suluh Indonesia, 2 Mei 1964
 Suluh Indonesia, 11 Mei 1964
 The Straits Times, 22 Januari 1963
 Warta Bhakti, 16 Februari 1965
 Warta Bhakti, 9 Maret 1965
 Warta Bhakti, 10 Maret 1965

Majalah

Sket Masa No. 12, Th. V, 1 April 1962.
 Sket Masa No. 11, Th. VI, 1 Maret 1963.
 Sket Masa. No. 21, Th. VI – September 1963
 Sket Masa, No. 22. Th. VI. 15 September 1963
 Sket Masa. No.8 Th. VII – 1964, 30 Januari 1964

Buku

Fernandes, Frans S. 1968. *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
 Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
 Joened, Marwati dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka.
 Mukmin, Hidayat. 1991. *TNI dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Jakarta: C.V. Muliasari.